

Evaluasi Kebijakan Subsidi Pupuk di Kelompok Tani Kopi Girimakmur, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung

Evaluation of Fertilizer Subsidy Policy in Girimakmur Coffee Farmers Group, Cilengkrang Sub District, Bandung District

Devina Tri Arista^{*1}, Eliana Wulandari²

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

²Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

*Email: devina22004@mail.unpad.ac.id

(Diterima 23-06-2026; Disetujui 30-07-2026)

ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan pilar utama perekonomian nasional yang mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah menjalankan kebijakan subsidi pupuk sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas produksi dan memfasilitasi kebutuhan petani, termasuk pada komoditas kopi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan subsidi pupuk di Kelompok Tani Kopi Girimakmur berdasarkan enam kriteria evaluasi Dunn dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasinya. Peneliti menggunakan metode penelitian campuran (*mix method*) dengan desain paralel konvergen. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 37 responden yang ditentukan dengan rumus Slovin, serta wawancara mendalam dengan informan kunci. Analisis data dilakukan menggunakan uji *Wilcoxon Signed-Rank* dan *Regulatory Gap Analysis* untuk mengukur kesenjangan antara Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dengan realitas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efisiensi dan pemerataan memiliki kinerja baik yang melampaui standar minimum berkat transisi sistem penebusan berbasis NIK/KTP dan transparansi pengurus kelompok. Dimensi kecukupan mencatatkan kesenjangan tertinggi (gap -1,41) karena alokasi kuota pupuk belum memenuhi kebutuhan riil lahan kopi petani. Dimensi responsivitas dan ketepatan waktu juga menunjukkan hambatan signifikan akibat ketiadaan saluran pengaduan resmi dan keterlambatan distribusi yang tidak sinkron dengan siklus pemupukan kopi. Faktor penghambat utama mencakup tantangan logistik geografis di kaki Gunung Palasari, kendala administrasi pada data keanggotaan, serta sistem dependensi stok tingkat kecamatan. Peneliti merekomendasikan peninjauan kuota pupuk secara berkala dan penyediaan platform pengaduan digital yang responsif bagi petani.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Subsidi Pupuk, Petani Kopi, *Regulatory Gap Analysis*

ABSTRACT

The agricultural sector serves as a primary pillar of the national economy supporting the sustainability of food security programs in Indonesia. The government implements the fertilizer subsidy policy as a strategic instrument to maintain production stability and facilitate input requirements for farmers, including coffee commodities. This research aims to analyze the implementation of the fertilizer subsidy policy in the Girimakmur Coffee Farmers Group based on Dunn's (2003) six evaluation criteria and to identify the inhibiting factors. The researcher employs a mixed-methods approach with a convergent parallel design. Data were collected through questionnaires from 37 respondents determined by the Slovin formula, as well as in-depth interviews with key informants. Data analysis was conducted using the Wilcoxon Signed-Rank test and Regulatory Gap Analysis to measure the discrepancy between Presidential Regulation Number 6 of 2025 and the field reality. Research results indicate that the efficiency and equity dimensions achieved good performance, exceeding minimum standards due to the transition to a NIK/KTP-based redemption system and group transparency. However, the adequacy dimension recorded the highest gap (-1.41) because the government's quota allocation has not fully met the farmers' actual needs. The responsiveness and timeliness dimensions also faced significant obstacles due to the absence of official complaint channels and distribution delays that were out of sync with the coffee fertilization cycle. Implementation inhibiting factors include geographical logistics challenges at the foot of Mount Palasari, administrative hurdles in membership data, and a stock dependency system at the district level. The researcher recommends a regular review of fertilizer quotas and the provision of a responsive digital complaint platform for farmers.

Keywords: Policy Evaluation, Fertilizer Subsidy, Coffee Farmers, *Regulatory Gap Analysis*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memberikan kontribusi strategis sebesar 12,61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2024. Pemerintah menetapkan kebijakan subsidi pupuk sebagai instrumen fiskal utama untuk menjaga stabilitas produksi pangan dan kesejahteraan petani. Alokasi anggaran subsidi pupuk mencapai angka Rp44,16 triliun pada tahun 2025 guna menjamin ketersediaan *input* bagi komoditas strategis, termasuk kopi. Pemerintah melakukan reformasi tata kelola melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang mentransformasi sistem distribusi dari Kartu Tani ke mekanisme berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna memangkas birokrasi. Kabupaten Bandung menduduki posisi sebagai produsen kopi Arabika tertinggi di Jawa Barat dengan volume produksi mencapai 9.010 ton pada tahun 2025. Kelompok Tani Kopi Girimakmur di Kecamatan Cilengkrang menghadapi tantangan operasional yang kompleks karena lokasi lahan berada di medan geografis ekstrem kaki Gunung Palasari. Hasil pra-survei Januari 2026 mengidentifikasi permasalahan krusial berupa ketidaksesuaian alokasi pupuk dengan kebutuhan riil nutrisi lahan petani kopi. Kendala administratif sistem e-RDKK serta ketimpangan data keanggotaan turut menghambat aksesibilitas 64 petani aktif dalam memperoleh hak subsidi mereka secara tepat waktu.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah menerapkan kebijakan subsidi pupuk untuk meningkatkan produktivitas usahatani dan menjaga stabilitas produksi pangan. Kabupaten Bandung menjadi wilayah dengan produksi kopi arabika tertinggi di Jawa Barat, mencapai 9.010 ton pada tahun 2025. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kritik terkait mekanisme penyaluran yang belum efektif dan tepat sasaran. Kelompok Tani Kopi Girimakmur di Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, merupakan salah satu penerima alokasi subsidi pupuk yang menghadapi tantangan geografis di kaki Gunung Palasari. Berdasarkan pra-survei, ditemukan adanya ketidaksesuaian alokasi pupuk dengan kebutuhan riil petani serta rumitnya prosedur administrasi e-RDKK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gambaran pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi implementasi berdasarkan enam dimensi Dunn (2003), serta mengidentifikasi faktor penghambat di lapangan. Peneliti menerapkan kerangka evaluasi Dunn (2003) sebagai landasan teoritis utama dalam membedah keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Enam dimensi evaluasi yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menjadi parameter pengukur kesenjangan antara standar regulasi dengan realitas di lapangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan subsidi pupuk menggunakan pendekatan *Regulatory Gap Analysis* guna mengidentifikasi besaran hambatan operasional bagi petani kopi. Hasil kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi teknis bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan distribusi input pertanian pada komoditas perkebunan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung di Kelompok Tani Kopi Girimakmur, Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, pada periode November 2025 hingga Juni 2026. Peneliti menerapkan pendekatan metode campuran (*mix method*) dengan jenis paralel konvergen guna menganalisis data kualitatif dan kuantitatif secara terpisah sebelum membandingkan hasilnya. Populasi penelitian mencakup 58 petani kopi dengan jumlah sampel kuantitatif sebanyak 37 responden yang ditentukan melalui rumus Slovin dan teknik *snowball sampling*. Informan kunci dalam data kualitatif meliputi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), ketua kelompok tani, serta pemilik kios resmi yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* guna mendapatkan informasi mendalam melalui wawancara.

Variabel penelitian dioperasionalkan berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2003) yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dimensi efektivitas mengukur pencapaian target melalui indikator peningkatan hasil panen, kesesuaian jumlah alokasi, dan kemanfaatan untuk usahatani. Dimensi efisiensi menelaah kemudahan operasional berdasarkan indikator kemudahan proses penibusan, kecepatan pelayanan, serta ketiadaan biaya tambahan di luar regulasi. Dimensi kecukupan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan dengan indikator kecukupan volume, kesesuaian jenis pupuk, dan kualitas mutu pupuk. Dimensi pemerataan menilai keadilan distribusi melalui indikator keadilan hak distribusi, kesamaan perlakuan pelayanan, dan distribusi kepada penerima hak. Dimensi responsivitas mengukur daya tanggap aparatur pada indikator kecepatan respons keluhan, ketersediaan saluran

pengaduan, dan daya tanggap penyediaan stok. Dimensi ketepatan membedah relevansi program melalui indikator ketepatan waktu stok, aksesibilitas lokasi distributor, serta kesesuaian harga beli dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Analisis data kuantitatif menggunakan uji validitas *Pearson Product Moment*, uji reliabilitas *Cronbach's Alpha*, serta uji normalitas Shapiro-Wilk guna menjamin kualitas instrumen. Peneliti menjalankan uji *Wilcoxon Signed-Rank* untuk membandingkan median skor implementasi aktual dengan *test value* 3,00 sebagai standar minimum kesesuaian regulasi. Teknik *Regulatory Gap Analysis* berfungsi mengukur besaran selisih antara realitas implementasi dengan standar ideal Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Analisis data kualitatif menempuh prosedur reduksi data untuk menyaring informasi krusial serta menggunakan triangulasi sumber guna menjamin kredibilitas hasil evaluasi dari berbagai perspektif aktor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan subsidi pupuk di Kelompok Tani Kopi Girimakmur mengalami transisi tata kelola dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Sistem penebusan telah beralih dari penggunaan Kartu Tani menjadi sistem berbasis NIK/KTP yang dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi petani. Organisasi ini mengelola lahan seluas 40 hektar dengan melibatkan 64 petani aktif, namun yang terdaftar secara sah dalam sistem *database* e-RDKK hanya 58 petani. Proses transaksi penebusan pupuk bersubsidi dilakukan di kios resmi dengan mewajibkan verifikasi digital melalui pendokumentasian foto diri petani serta pembubuhan tanda tangan elektronik.

Penelitian ini memiliki populasi sebanyak 58 petani kopi, akan tetapi responden yang digunakan adalah sebanyak 37 petani kopi untuk mengevaluasi implementasi kebijakan subsidi pupuk di Kelompok Tani Kopi Girimakmur. Sebagian besar responden berada pada kategori usia dewasa (usia 45-65 tahun), yang mencerminkan kematangan pengalaman praktis dalam budidaya kopi secara tradisional namun memiliki tantangan dalam adaptasi teknologi digital. Komposisi jenis kelamin didominasi oleh laki-laki, namun partisipasi petani perempuan tetap terwakili secara signifikan dalam keanggotaan kelompok tani. Profil penguasaan lahan petani didominasi skala kepemilikan kecil dengan luasan rata-rata berkisar antara 0,5 hingga 1,5 hektar per individu. Kopi Arabika menjadi komoditas utama yang diusahakan oleh seluruh anggota Kelompok Tani Kopi Girimakmur. Status kepemilikan lahan mayoritas responden adalah sebagai petani penggarap.

Analisis Kesenjangan (*Regulatory Gap Analysis*) menyajikan hasil untuk mengukur selisih antara standar ideal regulasi (*test value* 3,00) dengan realitas aktual di lapangan. Hasil pengolahan data pada Tabel 1 menunjukkan dinamika performa yang variatif pada setiap dimensi evaluasi Dunn.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif dan Gap Score

Variabel	Mean	Gap Score	Keterangan
Efektivitas (X1)			
X1.1	2,43	-0,57	Kesenjangan rendah
X1.2	2,95	-0,05	Kesenjangan rendah
X1.3	2,68	-0,32	Kesenjangan rendah
Efisiensi (X2)			
X2.1	3,03	0,3	Melampaui standar minimum
X2.2	2,73	-0,27	Kesenjangan rendah
X2.3	2,89	-0,11	Kesenjangan rendah
Kecukupan (X3)			
X3.1	1,59	-1,41	Kesenjangan sedang
X3.2	3,27	0,27	Melampaui standar minimum
X3.3	1,92	-1,08	Kesenjangan sedang
Pemerataan (X4)			
X4.1	3,14	0,14	Melampaui standar minimum
X4.2	2,95	-0,05	Kesenjangan rendah
X4.3	3,05	0,05	Melampaui standar minimum
Responsivitas (X5)			
X5.1	2,81	-0,19	Kesenjangan rendah
X5.2	2,05	-0,95	Kesenjangan sedang
X5.3	2,62	-0,38	Kesenjangan rendah
Ketepatan (X6)			
X6.1	2,22	-0,78	Kesenjangan sedang
X6.2	3,81	0,81	Melampaui standar minimum
X6.3	2,84	-0,16	Kesenjangan rendah

Sumber: Data Primer diolah (2026)

Dimensi efisiensi dan pemerataan mencatatkan capaian melampaui standar minimal pemerintah. Variabel kemudahan penebusan (X2.1) meraih skor positif (+0,3) karena transisi sistem ke NIK/KTP memberikan aksesibilitas yang lebih ringkas bagi petani. Prinsip transparansi pengurus dalam pembagian alokasi menjadi faktor utama keberhasilan pada dimensi pemerataan (X4.1) dengan skor +0,14. Dimensi kecukupan mengalami kesenjangan tertinggi dengan *gap score* sebesar -1,41 pada variabel porsi pupuk (X3.1). Volume pupuk bersubsidi belum mampu memenuhi kebutuhan nutrisi lahan kopi secara menyeluruh, sehingga petani terpaksa melakukan pembelian pupuk non-subsidi dengan harga tinggi. Dimensi responsivitas dan ketepatan waktu juga menunjukkan hambatan signifikan akibat ketiadaan saluran pengaduan resmi (-0,95) serta jadwal kedatangan stok yang sering terlambat (-0,78) dari masa pemupukan optimal.

Peneliti mengidentifikasi tiga faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan di Kelompok Tani Girimakmur. Pertama, hambatan administrasi berupa ketidaksesuaian data pekerjaan pada KTP dan lambatnya pembaruan *database* anggota dalam sistem e-RDKK. Kedua, kendala logistik geografis di kaki Gunung Palasari yang ekstrem membatasi kapasitas armada truk pengangkut hingga maksimal 8 ton, sehingga meningkatkan biaya distribusi. Ketiga, sistem dependensi distribusi di tingkat kecamatan yang memicu kelangkaan stok sementara karena kios desa tidak dapat mengambil alokasi baru sebelum stok kecamatan terserap sepenuhnya.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Budiharjo (2022) yang menyatakan bahwa kuota yang tidak sebanding dengan permintaan menjadi hambatan krusial dalam efektivitas kebijakan. Dualisme pada dimensi ketepatan (lokasi titik distribusi sangat baik namun waktu distribusi buruk) sejalan dengan analisis Ayu dkk. (2022) mengenai perlunya penyempurnaan aspek ketepatan waktu agar petani mendapatkan manfaat maksimal. Keterlambatan distribusi yang tidak sinkron dengan siklus pemupukan berisiko menurunkan kualitas hasil panen kopi petani secara signifikan.

KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan subsidi pupuk di Kelompok Tani Kopi Girimakmur menunjukkan bahwa transisi menuju Perpres 6/2025 berhasil meningkatkan efisiensi birokrasi penebusan (+0,3), namun belum dapat memenuhi dimensi kecukupan kuota (-1,41). Status kelompok tani sebagai kelas pemula menjadi faktor fundamental yang memperberat kendala administrasi e-RDKK. Secara teknis, kebijakan ini belum mampu memberikan dampak kesejahteraan yang maksimal karena petani masih harus menanggung beban biaya pupuk non-subsidi untuk menutupi kekurangan alokasi. Pembuat kebijakan diharapkan dapat melakukan peninjauan ulang kuota subsidi pupuk secara periodik yang disesuaikan dengan kebutuhan riil tanaman kopi per hektar. Secara manajerial, diperlukan penguatan kapasitas bagi kelompok tani kelas pemula melalui pendampingan intensif. Selain itu, pengembangan platform pengaduan digital yang responsif sangat mendesak untuk memfasilitasi laporan petani terkait keterlambatan distribusi dan kendala stok di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atifa, S., Alfikri, & Amayulis. (2025). Analysis Of The Implementation Of The Subsidized Fertilizer Program In Gapoktan Gurun Raya. *JURNAL AGRIBISAINS*, 11(1). <https://doi.org/10.30997/jagi.v11i1.18309>
- Ayu, I. W., Rahayu, S., Usman, U., & Wijayanti, N. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Subsidi Pupuk Di Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 6(4), 1597-1608.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2024 . Jakarta: BPS RI.
- Budiharjo, B. (2022). Evaluasi Program Penyaluran Subsidi Pupuk di Kabupaten Sambas- Kalimantan Barat. *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 65-84.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ghassani, R., & Supyandi, D. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi pada Petani Padi Desa Tinggar Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Mimbar*

- Agribisnis : Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(2), 2913.
<https://doi.org/10.25157/ma.v10i2.14568>
- Karniawati, N. (2025). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Garut No. 876/2013. *Tanah Pilih*, 5(1), 35-42.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2025). Laporan Kinerja Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025 . Jakarta: Kementan RI.
- Nasir, C. (2025). Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Indonesia: Kerangka Hukum, Permasalahan Implementasi, dan Strategi Reformasi. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 60-78.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
- Rachman, B. (2009). Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Kedepan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(4), 365-382.
- Riki, R., Abdal, A., & Abdillah, W. S. (2022). Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 121–134.
<https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.198>
- Widyawati, R. F. (2017). ANALISIS KETERKAITAN SEKTOR PERTANIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA (ANALISIS INPUT OUPUT). *Jurnal Economia*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.21831/economia.v13i1.11923>
- Wijayanti, N., Ayu, I. W., Rahayu, S., & Usman, U. (2021). Evaluasi Sistem Distribusi Pupuk Dalam Mendukung Ketersediaan dan Stabilitas Harga di Tingkat Petani. *Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan*, 4(2), 315-325.